

KINERJA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (ANBK) DI KABUPATEN GIANYAR

Gusti Ayu Dwi Intan Mahayoni¹⁾, I Putu Dharmanu Yudartha²⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: mahayoniintan@gmail.com¹, p_dharmanu@unud.ac.id², putriwirantari@unud.ac.id³

ABSTRACT

Computer-Based National Assessment (ANBK) is an assessment system used to measure the quality of education in schools. Based on the Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology Number 17 of 2021, one of the ANBK implementers at the district level is the Gianyar Regency Education Office. This study aims to determine the performance of the Education Office in implementing ANBK in Gianyar Regency. This type of research is qualitative research with a descriptive approach that utilizes primary and secondary data sources. Informants were determined by purposive sampling technique. This research study uses performance measurement theory according to Dwiyanto. The results showed that the performance of the Education Office in implementing ANBK in Gianyar Regency was quite good on several performance indicators, namely responsiveness and accountability. However, some performance indicators still need to be optimized, namely productivity, service quality, and responsibility in order to achieve better ANBK implementation.

Keywords: *Computer-Based National Assessment (ANBK), Gianyar District Education Office, Organizational Performance*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah usaha mendapatkan ilmu pengetahuan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui lingkungan formal maupun nonformal (Rohim, Rahmawati, & Ganestri, 2021). Evaluasi keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui suatu instrumen pengukur salah satunya yakni

Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. ANBK ini terdiri atas tiga instrumen pengukuran yakni AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) untuk menilai kemampuan literasi dan numerasi siswa, survei karakter untuk menilai karakteristik siswa,

dan survei lingkungan belajar untuk menilai iklim lingkungan belajar di sekolah (Novita, Mellyzar, & Herizal, 2021).

Pedoman pelaksanaan ANBK ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 013/H/PG.00/2022 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur mengenai peserta ANBK, persiapan instrumen dan teknis, biaya pelaksanaan, evaluasi, pelaporan hasil, tindak lanjut kendala, serta lembaga pemerintahan terkait yang menjadi pelaksana asesmen nasional baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar merupakan salah satu lembaga pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang telah menjalankan tugas dan perannya sebagai pelaksana asesmen nasional di Kabupaten Gianyar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan regulasi POS AN (Prosedur Operasional Standar Asesmen Nasional) tahun 2022, yang dimaksud dengan pelaksana asesmen nasional yakni lembaga atau badan yang menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait

pelaksanaan kebijakan teknis ANBK di tingkat pusat, daerah hingga satuan pendidikan. Adapun tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar sebagai pelaksana ANBK yakni melaksanakan sosialisasi kebijakan ANBK, persiapan dan koordinasi pendataan, verifikasi sekolah, memastikan ketersediaan sarana dan sumber daya manusia, melakukan pelatihan tim teknis ANBK, menetapkan pengawas, monitoring dan evaluasi, desiminasi hasil ANBK, hingga pelaporan kegiatan ANBK.

Penyelenggaraan ANBK di Kabupaten Gianyar telah dilaksanakan sejak tahun 2021 yang diikuti sebanyak 293 SD dan 43 SMP. Secara umum, ANBK masih memunculkan beberapa kelemahan dan permasalahan teknis yang harus diselesaikan secepatnya seperti pelaksanaan ANBK yang belum merata karena terbatasnya infrastruktur, komputer yang tiba-tiba error atau melambat, munculnya virus, hingga kualitas jaringan internet yang berbeda-beda di masing-masing wilayah maupun satuan pendidikan (Pusdatin Kemdikbud, 2021).

Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan atau hambatan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan

observasi penulis, permasalahan tersebut yaitu pertama, kualitas jaringan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ANBK yang kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari masih adanya kendala *error* yang dihadapi oleh siswa ketika ANBK berlangsung karena kualitas jaringan yang kurang optimal serta ketersediaan sarana komputer/laptop juga belum merata di setiap satuan pendidikan. Kedua, terbatasnya sarana operasional tim teknis ANBK di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, dimana hanya terdapat satu unit komputer yang digunakan sebagai sarana operasional oleh tim teknis ANBK. Ketiga, kurang optimalnya pelatihan teknis yang diberikan oleh dinas pendidikan kepada guru yang bertugas sebagai proktor ANBK di sekolah, yang berdampak pada tidak meratanya pengetahuan dan kemampuan teknis yang dimiliki terkait ANBK.

Permasalahan yang timbul tentu harus segera diatasi agar ANBK dapat terselenggara dengan baik serta mencapai hasil yang optimal. Hal ini menjadi tuntutan kinerja bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana asesmen nasional di tingkat daerah kabupaten.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis ingin meneliti secara mendalam mengenai “Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Kabupaten Gianyar”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Kinerja

Definisi kinerja yakni hasil (*output*) dari sebuah proses pelaksanaan kegiatan oleh komponen organisasi tertentu (*input*). Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai hasil dari keseluruhan proses kerja yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi (Rastiti, Wismayanti, & Yudartha, 2022). Mahsun (2019) berpendapat bahwa kinerja yakni gambaran pencapaian penyelenggaraan sebuah program guna mewujudkan misi dan visi organisasi, tujuan, serta sasaran yang tercantum dalam rencana strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja

Tujuan dari adanya pengukuran kinerja yakni digunakan untuk menilai seberapa baik tingkat keberhasilan dari program, kegiatan maupun kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Kegiatan pengukuran kinerja meliputi dua hal, yakni penetapan

indikator kinerja serta capaian kinerja. Dwiyanto dalam Pasolong (2018) mengatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan yang sangat penting dan berguna untuk mengukur seberapa baik kinerja birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Organisasi Publik

Organisasi menurut Darmanto dalam Erlianti & Fajrin (2021) adalah sekelompok orang yang dipersatukan secara formal dalam suatu kesepakatan bekerja sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya kinerja organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan yang memperlihatkan seberapa aktual pelaksanaan tugas dan misi organisasi terwujud (Steers, 2003). Kinerja organisasi menurut Sembiring dalam Erlianti & Fajrin (2021) merupakan hasil kerja organisasi secara menyeluruh yang didapatkan dengan melaksanakan kegiatan maupun program yang memanfaatkan berbagai sumber daya pada waktu tertentu.

Indikator Pengukuran Kinerja

Mengacu pada Dwiyanto dalam Pasolong (2018) menggunakan lima indikator dalam menilai kinerja organisasi publik, diantaranya:

- 1) Produktivitas, yaitu membandingkan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*), serta menilai sejauh mana produktivitas organisasi dapat dengan maksimal mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan publik yang diharapkan.
- 2) Kualitas layanan, berkaitan dengan seberapa baik mutu pelayanan yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat atau penerima layanan yang menjadi sasaran program kerja dalam suatu organisasi.
- 3) Responsivitas, dapat dilihat dari kapabilitas organisasi publik dalam melakukan identifikasi kebutuhan publik.
- 4) Responsibilitas, dapat dilihat dari apakah organisasi publik mengetahui penyelenggaraan program atau kegiatan sudah sejalan dengan prosedur yang berlaku.
- 5) Akuntabilitas, dapat dinilai dari keselarasan bentuk pertanggungjawaban yang dibuat dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Asesmen Nasional

Asesmen Nasional merupakan kebijakan pemerintah guna menilai kualitas pendidikan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang didasarkan pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021. Kualitas satuan pendidikan diukur dengan berpedoman pada hasil belajar siswa terkait literasi, numerasi, karakter, serta iklim dan proses pembelajaran di masing-masing sekolah. Informasi terkait hal di atas dapat diperoleh melalui tiga instrumen yaitu AKM, Survei Karakter, serta Survei Lingkungan Belajar yang diselenggarakan berbasis komputer (Kemdikbud, 2021).

Pelaksana Asesmen Nasional

Penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan *Teknologi* Nomor: 013/H/PG.00/2022 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022. Regulasi ini memuat prosedur yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan ANBK. Berdasarkan regulasi tersebut, pelaksana ANBK merupakan lembaga

atau badan negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan teknis ANBK dari tingkat pusat hingga daerah, sekolah umum, dan sekolah Indonesia di luar negeri.

Terkait hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar berperan sebagai pelaksana ANBK tingkat kabupaten yang mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab yakni melakukan sosialisasi kebijakan ANBK, persiapan dan koordinasi pendataan, verifikasi sekolah, memastikan ketersediaan sarana dan sumber daya manusia, melakukan pelatihan tim teknis ANBK, menetapkan pengawas ANBK, monitoring dan evaluasi, desiminasi hasil ANBK, hingga pelaporan kegiatan ANBK.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit organisasi publik yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, kinerja Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) merujuk pada indikator pengukuran kinerja menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2018) dapat dipaparkan hasilnya sebagai berikut:

1) Produktivitas

Indikator produktivitas dalam penelitian ini dilihat dari rasio *input* dan *output*, dimana inputnya yaitu sumber daya manusia, kerjasama antar pihak, dan sarana prasarana Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan ANBK serta outputnya yaitu kuantitas dan kualitas *output*. Adapun hasil analisis dari beberapa sub indikator yakni dari segi *input*: (a) SDM dinas pendidikan yang terlibat dalam pelaksanaan ANBK di Kabupaten Gianyar berjumlah 9 orang yang terdiri dari pengarah, penanggungjawab, sekretaris, 2 orang tim sekretariat, dan 4 orang tim teknis ANBK dengan latarbelakang pendidikan S1 dan S2 dan telah memiliki keahlian IT serta mengikuti pelatihan teknis oleh Kemdikbudristek. (b) Dinas

Pendidikan Kabupaten Gianyar melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kemdikbudristek dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali serta berkoordinasi dengan PLN terkait penyediaan listrik dan Telkom terkait penyediaan jaringan internet pada saat pelaksanaan ANBK. (c) Anggaran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan ANBK di Kabupaten Gianyar hanya berasal dari Dana BOS dan cukup terbatas karena tidak ada anggaran dari APBD. Terkait sarana operasional tim teknis juga belum memadai karena hanya disediakan satu komputer sedangkan anggota ada 4 orang, sehingga kinerja tim teknis menjadi kurang optimal. Kemudian dari segi *output*: (a) Kuantitas *output* meliputi adanya peraturan, pelayanan, dan sosialisasi yang menunjang ANBK. Penyelenggaraan ANBK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar didukung oleh Permendikbud No. 17 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 013/H/PG.00/2022. Terkait pelayanan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan yakni layanan pengaduan terkait ANBK bagi pelaksana ANBK (proktor) di satuan pendidikan. Dinas Pendidikan juga melaksanakan sosialisasi ANBK secara daring kepada proktor masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Gianyar guna memberikan pemahaman terkait pelaksanaan ANBK. (b) Kualitas *output* meliputi Adanya keberhasilan yang dicapai dan kegagalan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ANBK. Keberhasilan ANBK dapat dilihat dari pelaksanaan ANBK yang berjalan dengan baik dan hasil ANBK pada rapor pendidikan untuk Kabupaten Gianyar dapat dikatakan cukup baik. Terkait kegagalan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ANBK yaitu jaringan server pusat yang error, belum meratakan sarana ANBK di masing-masing sekolah sehingga masih terdapat sekolah yang menumpang atau meminjam sarana di sekolah lain. (c) Efisiensi *output* meliputi

Anggaran dana yang digunakan untuk biaya kegiatan penyelenggaraan ANBK kurang optimal karena terbatasnya sumber anggaran, dimana sumber anggaran hanya berasal dari dana BOS. Hal ini berdampak pada terbatasnya pelaksanaan beberapa kegiatan berkaitan ANBK seperti pengadaan sarana operasional dan pelaksanaan pelatihan yang kurang memadai.

2) Kualitas Layanan

Kualitas layanan dalam penelitian ini dilihat dari sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar dalam menunjang pelaksanaan ANBK. Adapun pelayanan yang disediakan yakni: (a) Pelatihan teknis ANBK yang menyasar proktor sekolah guna memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam teknis operasional ANBK. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar belum sepenuhnya dilakukan secara mandiri, melainkan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang dilaksanakan selama 2 hari di hotel dan hanya diikuti oleh

beberapa perwakilan sekolah dari seluruh kabupaten di Provinsi Bali. Hal ini berdampak pada belum meratanya pengetahuan dan kemampuan proktor sekolah di Kabupaten Gianyar terkait teknis ANBK karena hanya beberapa sekolah perwakilan Kabupaten Gianyar yang mendapatkan pelatihan tersebut. (b) Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar menyediakan layanan pengaduan bagi satuan pendidikan yang mengalami kendala saat pelaksanaan ANBK yang dapat diakses melalui *website* ANBK serta grup percakapan di *Whatsapp* dan *Telegram*. Dengan demikian, kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan dapat direspon dan diselesaikan dengan cepat oleh Dinas Pendidikan.

3) Responsivitas

Responsivitas dalam penelitian ini dilihat dari kesiapan dan respon dari dinas untuk menanggapi permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan dalam pelaksanaan ANBK. Kendala tersebut diantaranya: (a) kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan terutama di jenjang sekolah dasar

yakni sarana laptop yang masih belum merata dan memadai karena tidak semua sekolah dasar memiliki lab komputer. Terkait hal tersebut, Kemdikbud melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar memberikan bantuan sarana kepada satuan pendidikan berupa *chromebook* atau laptop khusus untuk menunjang pelaksanaan ANBK serta sekolah diarahkan untuk memberikan latihan kepada siswa mengenai cara penggunaannya. (b) kendala pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) lebih menjurus kepada kendala jaringan pusat yang error sehingga berdampak pada gagalnya penyelesaian ANBK oleh siswa. Terkait hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar melakukan koordinasi dengan pusat untuk penyelesaiannya, dimana sekolah akhirnya diberikan jadwal ulang untuk melaksanakan ANBK.

4) Responsibilitas

Responsibilitas dalam penelitian ini dilihat secara implisit dan eksplisit dari penyelenggaraan ANBK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar yang sesuai dengan standar operasional

prosedur yang berlaku. Secara implisit, SOP dapat dinilai dari adanya standar profesionalisme yakni Permendikbud No. 17 Tahun 2021 sebagai landasan hukum dan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 013/H/PG.00/2022 yang menjadi pedoman bagi dinas pendidikan dalam menyelenggarakan ANBK di Kabupaten Gianyar. Secara umum, baik pihak dinas dan sekolah sudah mengetahui SOP tersebut. Namun, masih terdapat beberapa proktor sekolah yang hanya mengetahui ada SOP tetapi belum secara jelas mengetahui peraturan mana yang menjadi dasar SOP penyelenggaraan ANBK. Adapun secara eksplisit dapat dinilai dari adanya pengawasan terhadap kegiatan ANBK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Berdasarkan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar dalam POS AN 2022, bentuk pengawasan yang dilakukan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ANBK di

masing-masing satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Gianyar. Namun pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini masih belum optimal karena terbatasnya jumlah petugas yang terjun ke lapangan dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penelitian ini dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik oleh Dinas Pendidikan terkait penyelenggaraan ANBK Kabupaten Gianyar. Bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yakni laporan pendampingan pelaksanaan ANBK berupa kuisisioner monev yang disampaikan kepada Disdikpora Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan pedoman SOP pelaksanaan ANBK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Kemudian, satuan pendidikan juga melaksanakan fungsi akuntabilitas dalam bentuk laporan yang dikirim melalui website ANBK yang meliputi berita acara pelaksanaan,

daftar hadir peserta, serta pakta integritas yang ditandatangani oleh proktor, pengawas, serta kepala sekolah. Terkait laporan pertanggungjawaban tersebut juga diisi oleh siswa yang menjadi peserta ANBK yang berupa laporan daftar hadir sebagai bukti telah mengikuti pelaksanaan ANBK. Adapun transparansi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan mengikuti transparansi oleh Kemdikbud berupa transparansi hasil ANBK secara umum berdasarkan skala wilayah yang dapat diakses oleh publik melalui situs resmi Kemdikbud. Transparansi pelaksanaan ANBK juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar melalui akun media sosial @disdikgianyarkab.go.id yang memuat dokumentasi kegiatan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi ANBK

5. KESIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan ANBK di Kabupaten Gianyar terukur cukup baik pada dua indikator yakni responsivitas dan akuntabilitas. Namun

masih perlu adanya optimalisasi kinerja pada indikator lain yakni produktivitas, kualitas layanan, dan tanggung jawab guna mencapai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar yang lebih optimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Pasolong, H. (2018). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, M. R. (2003). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sumber Jurnal atau Penelitian:

- Erlianti, D., & Fajrin, I. N. (2021). Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol. 1, No. 1, 68-75. Diakses dari <https://ejournal.ipdn.ac.id> pada 11 November 2022
- Novita, N., Mellyzar, M., & Herizal, H. (2021). Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, 172-179. Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1568> pada 12 November 2022
- Putra, G. D., Yudartha, I. P., & Wirantari, I. D. (2022). Strategi Dinas Pariwisata Dalam

- Pengembangan Pantai Binnaria di Kabupaten Buleleng Pada Masa Pandemi Covid-19. *OJS UNUD*, 1-9. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id> pada 08 November 2022
- Rastiti, L. E., Wismayanti, K. W., & Yudhartha, I. P. (2022). Kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Buleleng Dalam Pelayanan Melalui Web Layonsarikecapil.buleleng.go.id di Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Digital Government. *OJS UNUD*, 1-10. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id> pada 08 November 2022
- Rohim, D. C., Rahmawati, S., & Ganestri, I. D. (2021). Konsep Asesmen Kompetensi Minimum untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Varidika*, Vol. 33, No. 1, 54-62. Diakses dari <https://journals.ums.ac.id> pada 07 November 2022

Sumber Artikel:

- Kemdikbud. (2021). Asesmen Nasional: Lembar Tanya Jawab. 1-32. Diakses dari <https://repositori.kemdikbud.go.id/23592/> pada 10 November 2022
- Pusdatin Kemdikbud. (2021, Agustus 18). *Menilik Kesiapan Asesmen Nasional dari Kacamata Kecakapan Digital*. Diakses dari Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi:
<https://pusdatin.kemdikbud.go.id>
 pada 04 November 2022

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 013/H/PG.00/2022 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022.